

# **ANALISIS PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA DI KOTA AMBON**

Nur 'Ain Unsari Wattiheluw<sup>1</sup>; Linda Grace Loupatty<sup>2</sup>

Faculty Economics and Business University Pattimura Ambon, Indonesia  
Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka – Ambon (0911) 322579  
E-mail : [nur.ain.wattiheluw@gmail.com](mailto:nur.ain.wattiheluw@gmail.com) (Koresponding)

**Abstract:** This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in achieving the Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Ambon City, with a focus on four main pillars: social development, economic development, environmental sustainability, and legal and governance systems. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation of five BUMDes across five districts in Ambon City: Nusaniwe District (BUMDes Gideon Nusaniwe Sakti), Sirimau District (BUMDes Rurehe), Leitimur Selatan District (BUMDes Rajunohitipori), Teluk Ambon Baguala District (BUMDes Waipipi), and Teluk Ambon District (BUMDes Waisarot). The findings reveal that BUMDes play a vital role and have a positive impact on the realization of the four SDGs pillars. BUMDes contribute to poverty reduction by creating job opportunities, promote local economic growth through microenterprise development, initiate environmental conservation programs, and strengthen transparency and accountability in village governance. However, several challenges remain, including limited capital, low managerial capacity, and lack of innovation. Therefore, greater support from the government, private sector, and academia is needed to enhance the effectiveness of BUMDes in achieving sustainable village development goals.

**Keywords:** *Bumdes, Village Sdgs, Social Development Pillar, Economic Development Pillar, Environmental Development Pillar, Legal And Governance Pillar*

Pembangunan pedesaan di Indonesia merupakan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Desa memiliki peran penting dalam perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang memberikan otonomi desa untuk mengembangkan potensi SDM, SDA, teknologi, dan aspek kehidupan desa demi kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak desa menghadapi tantangan keberlanjutan ekonomi akibat pengelolaan sumber daya yang belum optimal, terbatasnya lapangan kerja, dan rendahnya pendidikan. Salah satu contohnya adalah Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, yang terdiri atas lima kecamatan: Nusaniwe, Sirimau, Leitimur Selatan, Teluk Ambon Baguala, dan Teluk Ambon.

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah komitmen global dan nasional untuk menyejahterakan masyarakat melalui 4 (empat) pilar dan 17 (tujuh belas)

tujuan pembangunan berkelanjutan, yang ditetapkan dalam Sidang Umum PBB pada 25 September 2015. SDGs merupakan penyempurnaan dari MDGs dengan cakupan yang lebih luas, melibatkan lebih banyak negara, memperluas sumber pendanaan, menekankan HAM, serta mendorong partisipasi Ormas dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

Kota Ambon menghadapi beberapa tantangan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, terutama terkait keberlanjutan ekonomi. Beberapa isu utama yang menjadi sorotan adalah, dikutip dari [tribun-maluku.com](http://tribun-maluku.com) oleh Pewarta Ibek Melsasail (7 September 2024), meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan ekonomi lokal, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi masalah signifikan di Kota Ambon. Data menunjukkan bahwa

kemiskinan terus menjadi tantangan utama, dengan tren peningkatan signifikan pada tahun 2023. Di lain sisi, terdapat ketimpangan ekonomi antara kecamatan di Kota Ambon, dengan beberapa daerah masih tertinggal dalam hal akses terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan (Pemerintah Kota Ambon, 2023).

Lima kecamatan di Kota Ambon masih memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan jalan yang memadai. Ketergantungan pada sumber daya alam dan ketidakseimbangan pembangunan infrastruktur sering menjadi hambatan dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Pemerintah Kota Ambon, 2023). Pemerintah Kota Ambon juga menghadapi defisit anggaran yang terus meningkat akibat penurunan pendapatan daerah dan peningkatan belanja operasional, yang membatasi kemampuan dalam membiayai program pembangunan yang mendukung SDGs Desa (BPK Ambon, 2025). Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang optimal, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Ambon menjadi sangat penting. BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan potensi lokal. Selain menjadi penopang ekonomi desa, BUMDes memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian SDGs. BUMDes dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Humanika, et al. 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yang terdiri atas 17 tujuan dan 4 pilar utama: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola (Humanika, et al. 2023). Sejumlah studi menyatakan bahwa kehadiran BUMDes mampu mendukung pemenuhan akses air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi yang merata, penurunan pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Nilawati & Harvitrananda, 2021; Yuliana & Alinsari, 2022; Mahfudhoh & Selfia, 2023; Muzhaqi, 2024; Siagian, et al. 2024). Penelitian lainnya juga menggarisbawahi bahwa BUMDes tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan dan legalitas tata kelola yang baik (Hardinugroho & Nugraheni, 2024; Rahdiana, et al. 2024).

*Social enterprise* adalah badan/organisasi atau perusahaan yang memakai strategi komersial guna meningkatkan kesejahteraan finansial, sosial, dan lingkungan, memaksimalkan profit serta dampak baik bagi setiap elemen usaha. Menurut Mair dan Marti, *social enterprise* berbeda dengan perusahaan konvensional karena mengoptimalkan nilai untuk tujuan sosial. Wawan Dhewanto menyebut *social enterprise* sebagai konsep di mana pengusaha menyesuaikan kegiatan mereka dengan tujuan menciptakan nilai sosial.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional hingga tahun 2030 yang disepakati oleh negara maju dan berkembang dalam Sidang Umum PBB pada 25 September 2015. SDGs bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam secara

berkelanjutan. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa harus memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan.

Tujuan dan sasaran SDGs Desa terbagi dalam 4 pilar besar untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pilar pertama adalah Pembangunan Sosial, di antaranya SDGs Desa 1 yang menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta menciptakan kemandirian ekonomi, SDGs Desa 2 menyoroti penghapusan kelaparan dan kekurangan gizi, serta pembangunan pertanian berkelanjutan. Ini mencakup dukungan terhadap petani, penguatan ketahanan pangan, dan distribusi pangan yang lebih adil. Selanjutnya, SDGs Desa 5 menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Tujuannya mencakup penghapusan diskriminasi, partisipasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik serta penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pilar kedua adalah Pembangunan Ekonomi, di antaranya SDGs Desa 8 untuk pertumbuhan ekonomi desa yang merata melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. SDGs Desa 9 mengarah pada pembangunan infrastruktur yang sesuai kebutuhan dasar serta mendorong inovasi desa yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan penting.

Selanjutnya, Pilar Pembangunan Lingkungan, diwakili oleh SDGs Desa 14 dan 15. SDGs Desa 14: Desa Peduli Lingkungan Laut bertujuan menjaga ekosistem laut dan pesisir melalui pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengurangan pencemaran, dan pengembangan ekonomi berbasis ekowisata. Ini penting bagi negara maritim seperti Indonesia untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir. SDGs Desa 15: Desa Peduli Lingkungan Darat menyoroti pentingnya menjaga tanah, air, udara, dan seluruh sumber daya alam di darat yang menjadi penopang utama kehidupan manusia. Sementara itu, pilar terakhir Hukum dan Tata Kelola yaitu SDGs Desa 16: Desa Damai

Berkeadilan, tujuan ini berfokus pada terwujudnya desa yang damai, aman, dan berkeadilan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

BUMDes bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, BUMDes juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta memperkuat kerja sama antar desa dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Pengelolaan BUMDes diatur dalam UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang memberikan legitimasi hukum dan ruang usaha yang luas.

Secara lebih luas, BUMDes memiliki peran strategi dalam mendukung pencapaian empat pilar SDGs Desa: ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Dalam aspek ekonomi, BUMDes berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan desa melalui penciptaan peluang usaha dan peningkatan pendapatan warga. Dalam aspek sosial, BUMDes memperkuat partisipasi dan tanggung jawab warga dalam pembangunan.

BUMDes juga dapat mengelola berbagai jenis usaha, seperti usaha sosial (pelayanan publik), usaha keuangan (permodalan), penyewaan, perantara jasa, produksi dan perdagangan, hingga usaha holding (induk dari unit usaha desa). Jenis-jenis usaha ini menunjukkan fleksibilitas dan luasnya cakupan BUMDes dalam menjawab kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes menjadi instrumen penting dalam memperkuat desa sebagai entitas yang mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Pengelolaan BUMDes dalam rangka mendukung tercapainya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun pelaksanaannya memerlukan evaluasi yang efektif serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Evaluasi terhadap kontribusi BUMDes

dalam mendukung SDGs Desa sangat penting agar masyarakat, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memahami sejauh mana perencanaan dan pelaksanaan program BUMDes berdampak terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan (Humanika, et al. 2023; Nilawati & Harvitrananda, 2021).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara rinci fenomena sosial di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi konteks, kompleksitas, serta subjektivitas objek penelitian, khususnya berkaitan dengan pengelolaan dan dampak BUMDes. Data dikumpulkan bukan melalui statistik, tetapi melalui pemahaman mendalam atas informasi dari para informan.

## HASIL

### Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar Pembangunan Sosial

BUMDes di wilayah kota Ambon telah mengembangkan berbagai unit usaha yang berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan. rincian jumlah unit usaha yang dikelola oleh masing-masing BUMDes disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. BUMDes di Kota Ambon

Kecamatan	BUMDes	Jumlah Unit Usaha	Jenis Usaha
Nusaniwe	Gideon Nusaniwe Sakti (2022)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pariwisata Paralayang</li> <li>Pertanian (Pisang, Pepaya, dan ubi-ubian)</li> </ul>
Sirimau	BUMDes Rurehe (2018)	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyewaan Lapangan</li> <li>Laundry</li> <li>Agen BNI 46</li> <li>Mitra Bulog Lanjutan</li> <li>Turnamen Rurehe Cup III</li> <li>Pengembangan Wisata Air</li> <li>Pengembangan Wisata Kuliner (Boot Jualan)</li> </ul>

Leitimur Selatan	Rajunohitipori (2018)	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keramba Apung</li> <li>Distribusi Barang Bangunan &amp; Sembako</li> <li>Penangkapan Ikan</li> <li>Agen BRI</li> <li>Perkebunan Hidroponik</li> <li>Kemitraan UMKM dengan warga</li> <li>Tempat Foto Copy</li> </ul>
Teluk Ambon Teluk Ambon Baguala	Waipipi (Revitalisasi 2022)	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pinjaman Modal Usaha</li> <li>Keramba Ikan</li> <li>Toko Mebel &amp; Material</li> <li>Transportasi Ojek</li> </ul>
Teluk Ambon	Waisarot (2018)	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budidaya Ikan</li> <li>Agen Mandiri</li> <li>Toko Sembako &amp; ATK.</li> </ul>

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa setiap BUMDes memiliki unit usaha yang berbeda-beda sesuai dengan potensi lokal yang ada di desa masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa yang ada di kecamatan kota Ambon memiliki strategi yang unik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah persentase warga miskin yang mendapatkan manfaat dari unit usaha BUMDes:

Tabel 2. Persentase Warga Miskin yang Mendapat Manfaat dari Usaha BUMDes

BUMDes	Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Manfaat	Persentase
Gideon Nusaniwe Sakti	3 KK pemilik kios, pekerja tukang bangunan dan kebersihan sebanyak 25 warga, dan tenaga kerja di unit usaha BUMDes 9 warga (warga miskin 31 KK)	94%
Rurehe	Seluruh warga desa mendapatkan manfaat melalui PAD (40 KK warga miskin semuanya dapat bantuan)	100%
Rajunohitipori	14 KK warga miskin desa mendapat	100%

	pekerjaan di BUMDes	
<b>Waipipi</b>	140 KK dari 150 warga miskin mendapatkan akses modal usaha	93%
<b>Waisarot</b>	61 KK penerima BLT semua mengambil bantuan di BUMDes	100%

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel di atas, terlihat total jumlah warga miskin yang mendapat manfaat dari kehadiran BUMDes telah memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan melalui berbagai mekanisme, baik secara langsung melalui pemberian modal usaha maupun secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja.

BUMDes juga memiliki peran dalam mendukung masyarakat miskin melalui bantuan pangan atau kebutuhan pokok. Dalam perspektif teori ekonomi kesejahteraan, Sen (1999) menyatakan bahwa akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan layanan sosial merupakan bagian penting dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat.

Tabel 3. Jumlah Warga Miskin yang Menerima Bantuan dari BUMDes

BUMDes	Jumlah Penerima Bantuan/Kepala Keluarga (KK)
<b>Gideon Nusaniwe Sakti</b>	34
<b>Rurehe</b>	40
<b>Rajunohitipori</b>	14
<b>Waipipi</b>	140
<b>Waisarot</b>	61

Sumber: Data diolah, 2025

Pada tabel ini, per Kepala Keluarga (KK) mendapatkan bantuan dari BUMDes bervariasi. Beberapa BUMDes langsung memberikan bantuan kepada warga miskin, sementara yang lain menyetor keuangan ke desa untuk dikelola lebih lanjut.

BUMDes telah berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dengan menyediakan akses keuangan, peluang usaha, serta program ketahanan pangan. Dengan peningkatan PAD desa dan investasi dalam unit usaha yang berkelanjutan, BUMDes membantu menciptakan fondasi ekonomi yang lebih stabil bagi masyarakat desa.

Berdasarkan data dari lima BUMDes

yang diteliti, seluruh warga di empat desa mendapatkan akses terhadap pangan sehat dan bergizi melalui program-program BUMDes, sementara di satu desa, cakupan akses mencapai 80% warga. Data ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Persentase Warga yang Mendapatkan Akses Pangan

BUMDes	Persentase Warga yang mendapatkan Akses Pangan
<b>Gideon Nusaniwe Sakti</b>	100%
<b>Rurehe</b>	100%
<b>Rajunohitipori</b>	100%
<b>Waipipi</b>	80%
<b>Waisarot</b>	100%

Sumber: Data diolah, 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat telah mendapatkan akses pangan melalui intervensi BUMDes. BUMDes yang memiliki cakupan di bawah 100% faktor kendalanya hanya 20% nya belum mengetahui keberadaan unit usaha BUMDes saja. BUMDes juga telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di desa, baik melalui peningkatan pendapatan, perubahan sosial, maupun kemandirian ekonomi. Dengan adanya dukungan berkelanjutan, perempuan dapat lebih berdaya dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 5. Persentase Perempuan yang Bekerja dalam Usaha BUMDes

BUMDes	Persentase
<b>Gideon Nusaniwe Sakti</b>	44%
<b>Rurehe</b>	46%
<b>Rajunohitipori</b>	67%
<b>Waipipi</b>	67%
<b>Waisarot</b>	33%

Sumber: Data diolah, 2025

### Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar Pembangunan Ekonomi

Keberadaan BUMDes di desa-desa yang diteliti oleh peneliti telah memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi desa/negeri, dengan dampak yang beragam:

- 1) Kecamatan Nusaniwe – Negeri Nusaniwe: Pariwisata menjadi sektor dengan pertumbuhan paling pesat

- karena minat wisatawan yang tinggi
- 2) Kecamatan Sirimau – Desa Galala: Kontribusi PAD dari BUMDes telah membantu menurunkan jumlah warga miskin dari 71 menjadi 40 orang. Selain itu, lapangan kerja semakin banyak tercipta serta akses keuangan lebih mudah melalui Agen BNI'46
  - 3) Kecamatan Leitimur Selatan – Negeri Rutong: Terdapat empat dampak utama dari BUMDes, yaitu: (1) kontribusi PAD Rp 100.000.000,- lebih ke desa, (2) 14 KK miskin mendapatkan pekerjaan, (3) peningkatan kemandirian ekonomi perempuan, dan (4) perluasan pasar produk lokal serta akses keuangan lebih mudah melalui Agen BRI
  - 4) Kecamatan Teluk Ambon Baguala – Desa Nania: Memberikan akses permodalan kepada 140 KK miskin (130 di antaranya adalah perempuan), mendampingi 16 usaha mebel yang mempekerjakan 32-48 tukang dari kelompok miskin, serta menyumbangkan hampir Rp 15.000.000,- ke PAD desa
  - 5) Kecamatan Teluk Ambon – Desa Hunuth: Menyediakan akses keuangan lebih mudah melalui Agen mandiri. Namun pertumbuhan ekonomi saat ini masih terbatas karena unit usaha yang ada lebih banyak pada kebutuhan pokok, sementara sektor pertanian baru berjalan

BUMDes tidak hanya berperan sebagai unit usaha desa, tetapi juga sebagai fasilitator ekonomi lokal yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai pihak eksternal. Kemitraan yang telah dijalin oleh BUMDes memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi desa.

Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar Pembangunan Lingkungan

BUMDes di kota Ambon berperan dalam mendukung nelayan lokal baik melalui penyediaan bibit, pemasaran, maupun akses terhadap pasar yang lebih luas. Berikut adalah jumlah nelayan yang mendapat manfaat dari unit usaha BUMDes:

Tabel 6. Nelayan yang Terlibat Usaha BUMDes

BUMDes	Jumlah
Rurehe	10 orang

Rajunohitipori	25 orang
Waipipi	2 orang
Waisarot	23 orang

Sumber: Data diolah, 2025

Pengelolaan sumber daya laut oleh BUMDes di kota Ambon telah berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Meskipun masih ada tantangan dalam pengelolaan usaha berbasis perikanan, peran BUMDes dalam distribusi hasil laut, pengembangan budidaya ikan, serta pemberdayaan nelayan lokal merupakan langkah positif menuju ekonomi desa yang lebih berkelanjutan.

### Peran BUMDes dalam Mewujudkan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Melalui kebijakan dan program yang inklusif, BUMDes dapat membantu mencegah ketimpangan sosial serta mengurangi potensi konflik akibat ketidakadilan ekonomi.

BUMDes di berbagai desa telah menjalankan kebijakan dan program yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung kesetaraan sosial dan keadilan bagi semua warga desa. Berikut beberapa inisiatif yang telah diterapkan:

- Akses Keuangan dan Peluang Usaha
  1. BUMDes Gideon Nusaniwe Sakti: Menyediakan akses usaha bagi petani, pelaku UMKM, dan pekerja wisata, serta meningkatkan akses terhadap pasar digital dan promosi usaha.
  2. BUMDes Rurehe: Memberikan dukungan bagi UMKM dan pelaku usaha kecil, serta bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu.
  3. BUMDes Rajunohitipori: Menerapkan kebijakan kesempatan kerja bagi warga miskin dan pemberdayaan perempuan melalui kemitraan UMKM.
  4. BUMDes Waipipi: Menyediakan pinjaman modal usaha bagi kelompok rentan, termasuk perempuan pelaku usaha kecil dan keluarga miskin.
  5. BUMDes Waisarot: Meskipun tidak

memiliki program khusus, kebijakan yang diterapkan memungkinkan semua warga mendapatkan akses yang sama terhadap layanan keuangan, peluang usaha, dan ketahanan pangan.

- Penyediaan Lapangan Kerja
- Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Program Sosial

Ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi sering menjadi penyebab utama konflik di masyarakat. Dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil, BUMDes di kota Ambon telah berperan aktif dalam mencegah konflik yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Beberapa strategi yang diterapkan:

- a) Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, sehingga tidak ada kelompok yang merasa tertinggal.
- b) Distribusi pangan yang merata, memastikan akses terhadap kebutuhan pokok bagi semua warga.
- c) Peningkatan akses keuangan, terutama bagi kelompok yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman modal.

Keberadaan BUMDes telah memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial di desa. Melalui berbagai program yang diterapkan, BUMDes tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. Dengan meningkatnya kesejahteraan dan berkurangnya kesenjangan ekonomi, potensi konflik sosial dapat ditekan, sehingga desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peran BUMDes di lima kecamatan Kota Ambon dalam mendukung pencapaian empat pilar SDGs Desa, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masing-masing BUMDes telah memainkan peran strategis yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal desa

masing-masing.

Aspek ini sangat relevan dengan teori kapabilitas dari Amartya Sen (1999), yang menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak semata-mata ditentukan oleh pendapatan, tetapi oleh kemampuan untuk mengakses sumber daya dasar kehidupan.

Keterbatasan infrastruktur dan dana operasional, pendekatan berkelanjutan yang diterapkan menunjukkan bahwa BUMDes telah menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, sebagaimana dikemukakan dalam konsep pembangunan berkelanjutan oleh Brundtland Report (1987).

Keberadaan BUMDes juga terbukti dapat meredam potensi konflik sosial yang sering kali muncul akibat ketimpangan ekonomi. Ketika akses terhadap sumber daya dan peluang usaha didistribusikan secara adil, kohesi sosial akan terjaga, dan stabilitas desa dapat dipertahankan. Ini sejalan dengan teori pembangunan komunitas dari Chambers (1993) yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam merancang masa depan desa mereka sendiri.

## SIMPULAN

BUMDes di lima kecamatan Kota Ambon yaitu: Kecamatan Nusaniwe BUMDes Gideon Nusaniwe Sakti, Kecamatan Sirimau BUMDes Rurehe, Kecamatan Leitimur Selatan BUMDes Rajunohitipori, Kecamatan Teluk Ambon Baguala BUMDes Waipipi, dan Kecamatan Teluk Ambon BUMDes Waisarot telah berperan penting dalam mendukung pencapaian SDGs Desa melalui berbagai pilar pembangunan. Dalam aspek sosial, BUMDes berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan perempuan. Di bidang ekonomi, BUMDes mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan desa, serta menjalin kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, beberapa BUMDes

menjalankan inisiatif seperti penghijauan, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, dan pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan laut dan darat. Sementara itu, dalam hal hukum dan tata kelola, BUMDes telah membantu menciptakan sistem pemerintahan desa yang lebih transparan, inklusif, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan formal. Secara keseluruhan, BUMDes tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan stabilitas desa. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs Desa untuk menciptakan desa yang damai, adil, dan berkelanjutan

#### DAFTAR RUJUKAN

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Adha, F. (2022). *Pengelola Dana Desa Dalam Mewujudkan SDGs Didesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Fakih, M. (2008). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fandeli, C. (2000). *Pengusaha ekowisata*. Diterbitkan atas kerjasama Fakultas Kehutanan UGM [dengan] Pustaka Pelajar [dan] Unit Konservasi Sumberdaya Alam DIY.
- FAO. (2018). *The state of world fisheries and aquaculture 2018: Meeting the sustainable development goals*. Food and Agriculture Organization.
- FAO. (2020). *The state of food security and nutrition in the world 2020: Transforming food systems for affordable healthy diets*. Food and Agriculture Organization.
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pencapaian SDGs Desa. *Jurnal AGRIFO*, Vol. 8 (2): Hal. 101-116.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464.
- Kemendes PDTT. (2020). *Panduan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Strategi pengelolaan sumber daya perikanan berbasis komunitas*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Kholifah, N. (2018). Analisis Destinasi Ziarah Dalam Konsep SDGs (Sustainable Development Goals) Di Kabupaten Demak. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. UPP AMP YKPN.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Latumeten, R. (2019). Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kota Ambon: Potensi dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 45-58.
- Lewis, W. A. (1954). Economic development with unlimited supplies of labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191.
- Mahfudhoh, & Yeni, S. (2023). Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendukung SDGs Desa Di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Lamongan / PRAJA LAMONGAN*, Vol. 6, No. 1.
- Mair, J., & Martí, I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and

- delight. *Journal of World Business*, 41(1), 36–44.
- Muzhaqi, A. (2024). Pembangunan Berkelanjutan Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur). *JRIME: Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 2 (1): Hal.329-348.
- Nilawati, E., & Harvitrananda, P. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 9 (1): 11-25.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam kajian ilmu sosial dan pendidikan*. UNS Press. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Laporan inklusi keuangan di Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Pauly, D. (2010). *Five easy pieces: How fishing impacts marine ecosystems*. Island Press.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor. (2015). Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. *Permendes Nomor 4 Tahun 2015*.
- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- ProBUMDES. (2022, Juni 2). *Tujuan BUMDes Menurut Para Ahli dan Undang - Undang*. Retrieved from <https://www.bumdes.com/blog/tujuan-bumdes-menurut-para-ahli-dan-undang-undang>.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rahdiana, N., Imron, C., Yasin, M. A., & Pratama, R. F. (2024). Implementasi Fungsi Bumdes Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa. *Jurnal Buana Pengabdian*, Vol. 6 (1): Hal. 88-107.
- Rosiani, T., & Siyami, N. (2023). Dampak Tata Kelola BUMDes dan Peran Kolaborasi Pentahelix Dalam Mewujudkan SDGs Desa. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 12 (2): Hal. 70-84.
- Sari, Y. (2021). Keterbatasan Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Perekonomian Desa di Ambon. *Jurnal Infrastruktur & Kebijakan Publik*, 9(3), 12-25.
- Saragih, J. (2019). *Distribusi pangan dan rantai pasok ekonomi desa*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 120–134.
- Schumpeter, J. A. (1934). *The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle*. Harvard University Press.
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation*. Oxford University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Siagian, G. J., & Sitorus, A. B. (2024). Analisis Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISPOL : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol. 4 (1): Hal. 34-45.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiono. (2016). *Metode penelitian kualitatif untuk analisis sosial*. Gramedia.
- Suharto, E. (2005). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.

- Sutoro Eko. (2016). *Badan Usaha Milik Desa: Teori dan praktik*. Pustaka Pelajar.
- Swasono, S. E. (2018). *Ekonomi berbasis komunitas dan pembangunan desa berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Kerakyatan, 10(1), 45–60.
- Tambunan, T. (2019). *UMKM dan tantangan pertumbuhan ekonomi daerah*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Tasia, E., & Martiningsih, R. S. (2023). Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri di Desa Jenggala, KLU). *Jurnal Risma*, Vol. 3 No. 3, Hal. 105-117.
- Tasia, E., Martiningsih, R. S., Priyambodo, V. K., Anggara, J., & Kartikasari, N. (2023). Literasi Tata Kelola BUMDes Dalam Rangka Peningkatan Potensi Ketercapaian SDGs Desa Jenggala Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Vol. 1 (3): Hal. 584-588.
- Timmer, C. P., Falcon, W. P., & Pearson, S. R. (1983). *Food policy analysis*. Johns Hopkins University Press.
- Todaro, M. P. (2006). *Economic development* (10th ed.). Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.
- Tuharea, M. (2021). Peran BUMDes dalam Meningkatkan Perekonomian Desa di Ambon. *Jurnal Manajemen Desa*, 8(4), 67-79.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009. (n.d.). *tentang Kepariwisata*, p. BAB 1 Pasal 1 Ayat (1).
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. (n.d.). *tentang Cipta Kerja, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2021). *Inclusive economic growth: Policies for sustainable development*. UNDP.
- United Nations Women. (2020). *Gender equality and women's empowerment in the economy*. UN Women.
- Uphoff, N. (1996). *Learning from Gal Oya: Possibilities for participatory development and post-Newtonian social science*. Cornell University Press.
- Wattimena, P. (2020). Defisit Anggaran dan Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kota Ambon. *Jurnal Keuangan Publik*, 7(2), 21-35.
- Wawan Dhewanto. (2020). *Social enterprise: Pengembangan kewirausahaan sosial di Indonesia*. Penerbit Universitas.
- World Bank. (2018). *The impact of microcredit on household income: Evidence from developing countries*. World Bank Publications.
- World Bank. (2020). *Poverty and shared prosperity 2020: Reversing setbacks from COVID-19*. World Bank Publications.
- World Health Organization (WHO). (2021). *Stunting and child nutrition: A global perspective*. WHO.
- Yuliana, E., & Alinsari, N. (2022). Penerapan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 (2): Hal. 2919-2929.
- Yulianda, F. (2007). Ekowisata Bahari Sebagai Alternatif Pemanfaatan Sumberdaya Pesisir Berbasis Konservasi. *Makalah Seminar Sains pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan*, Bogor.
- Zimmere, T., & Scarborough, N. M. (2008). *Essentials of entrepreneurship and small business management* (5th ed.). Pearson